

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan pemilihan umum pada beberapa daerah di Indonesia masih bermasalah terkait tingginya tingkat golongan putih (golput) akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja politik. Pelaksanaan partai politik masih terancam penggunaan politik uang dalam mempengaruhi proses pemilihan, sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Melihat hal tersebut perlu adanya penanganan dalam menangani rendahnya pendidikan pemilih bagi pemilih pemula. Sementara itu, dalam mewujudkan tingkat pendidikan politik masih terjadi kendala dimana Komisi Pemilihan Umum harus berperan aktif dalam memberikan sosialisasi tentang bagaimana pentingnya pendidikan politik bagi Pemilih Pemula dimana pada tahun 2024 akan dilaksanakan pemilihan Presiden.

Dasar dari Negara demokratis merupakan seberapa besar Negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Partisipasi masyarakat dalam politik merupakan salah satu wujud dari berhasilnya suatu penyelenggaraan pemilihan umum dengan memberikan hak pilihnya yang dimiliki oleh masyarakat sebagai hak pilih untuk memilih. Indonesia adalah Negara yang memakai sistem demokrasi, yakni kekuasaan pemerintahannya bermula dari Rakyat. Karenanya partisipasi pemilih menjadi perspektif yang signifikan dalam struktur Negara demokrasi. Partisipasi berpolitik, dapat mempengaruhi legitimasi masyarakat untuk jalannya suatu pemerintahan berdasarkan hubungannya dengan Demokrasi.

Sejalan dengan itu, partisipasi menjadi aspek yang signifikan (penting) dalam struktur Negara demokrasi. Pendapat yang melandasi demokrasi yaitu individu yang paling memikirkan apa yang berguna baginya adalah individu tersebut. Sebab, keputusan politik yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh pemerintah berdampak pada keberadaan warga, warga memiliki pilihan untuk ikut menentukan substansi pilihan yang mempengaruhi kehidupan mereka untuk kepentingan mereka, masyarakat dalam mempengaruhi proses penetapan dan menjalankan keputusan politik.

Dalam pemilihan umum, misalnya berpartisipasi dapat mempengaruhi keadilan wilayah setempat terhadap calon pasangan yang terpilih. Setiap warga Negara memiliki

kecenderungan dan kepentingannya sendiri untuk memutuskan keputusan mereka dalam pemilihan umum. Dapat dikatakan bahwa nasib pemimpin yang dipilih dalam pesta demokrasi bergantung pada kecenderungan masyarakat sebagai pemberi hak suara. Bukan itu saja, partisipasi dalam pengambilan keputusan dapat dipandang sebagai penilaian dan control masyarakat terhadap pemerintahan dan pemimpin. Menurut Undang-undang No.15 Tahun 2011 Mengenai dengan Penyelenggaraan pemilihan umum, dinyatakan bahwa *“untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan keputusan umum yang dapat menjamin terlaksananya hak politik bermasyarakat diperlukan penyelenggara pemilu yang professional, punya integritas, akuntabilitas dan kapabilitas melalui KPU”*, sehingga dalam pelaksanaannya dapat memahami kerja sama masyarakat untuk membantu terlaksananya pemilihan umum yang bersifat jujur, adil dan bersih sesuai dengan system demokrasi dan kebijakan Warna Negara Indonesia.

KPU mesti bertindak professional dengan memutuskan langkah apa saja yang mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka sadar akan hak serta kewajiban sebagai warga Negara. Melakukan sosialisasi sebagai bentuk untuk mendorong partisipasi berpolitik masyarakat pada pemilu merupakan salah satu tugas KPU. Beberapa dari tugas tersebut secara jenjang jabatan dilakukan oleh Komisi pemilihan umum kabupaten/kota, komisi pemilihan umum pusat serta komisi pemilihan umum provinsi sesuai dengan yang telah dijelaskan pada UU No.15 Tahun 2011 mengenai komisi pemilihan umum. Oleh karena itu untuk membangun kesadaran politik pada masyarakat menjadi tugas Komisi Pemilihan Umum.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi di mana pemegang kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat melaksanakan kegiatan Pemilu wajib dilakukan karena Pemilu merupakan pilar utama dari proses akumulasi kehendak rakyat dan indikator kesuksesan Pemilu terlihat dari tingkat partisipasi politik masyarakat terutama partisipasi pemilih.

Merujuk pada ini strategi komunikasi yang dilakukan KPU RI melalui sosialisasi pendidikan politik. Sosialisasi pendidikan politik dimulai dari tahap pengenalan yang mencakup pengetahuan bernilai demokrasi dan bimbingan teknis mengenai pemberian hak suara secara tepat sehingga hak tersebut dianggap sah dan berdampak pada meningkatnya jumlah partisipan pemilih.

**REKAPITULASI TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH
PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
KOTA : TANGERANG SELATAN**

NO	URAIAN		KECAMATAN							JUMLAH AKHIR
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH		SERPONG	SERPONG UTARA	PONDOK AREN	CIPUTAT	CIPUTAT TIMUR	PAMULANG	SETU	
A.	DATA PEMILIH									
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT	LK	51.680	42.869	105.012	70.280	60.035	112.084	27.804	469.764
		PR	53.127	44.540	106.735	71.201	61.799	113.711	27.694	478.807
		JML	104.807	87.409	211.747	141.481	121.834	225.795	55.498	948.571
	2. Jumlah Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK	LK	56.073	47.577	111.786	75.285	64.566	116.494	29.443	501.224
		PR	58.469	50.339	114.831	77.274	67.456	119.178	29.577	517.124
JML		114.542	97.916	226.617	152.559	132.022	235.672	59.020	1.018.348	
B.	PENGGUNA HAK PILIH									
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	LK	40.314	33.195	81.125	55.535	45.914	87.190	22.762	366.035
		PR	42.469	35.036	84.791	58.332	48.872	91.899	23.262	384.661
		JML	82.783	68.231	165.916	113.867	94.786	179.089	46.024	750.696
	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTb dan DPK	LK	44.600	37.400	87.029	60.352	50.119	91.459	24.331	395.290
		PR	47.671	40.297	91.839	64.199	54.091	97.160	25.082	420.339
JML		92.271	77.697	178.868	124.551	104.210	188.619	49.413	815.629	
C.	TINGKAT PARTISIPASI									
	LK	78,01	77,43	77,25	79,02	76,48	77,79	81,87	77,92	
	JML	80,56	79,35	78,93	81,64	78,93	80,03	83,72	80,09	

Gambar 1. 1 Rekapitulasi partisipasi pemilih pada pilpres 2019

Sumber : Narasumber KPU Kota Tangsel

(pada tgl 3 Juli 2024, 13.15 WIB

Kota Tangerang Selatan sebagai berikut :

No	Kecamatan	DATA PEMILIH		PENGGUNA HAK PILIH					PRESENTASE PARTISIPASI				
		Jumlah DPT_LP	Jumlah_DPK_LP	Sum of PPWP_PENG GUNA_LP (DPT+DPTb+DPK)	Sum of DPR_PENG GUNA_LP (DPT+DPTb+DPK)	Sum of DPR_PENG GUNA_LP (DPT+DPTb+DPK)	Sum of PROV_PENG GUNA_LP (DPT+DPTb+DPK)	Sum of KOT_PENGGUNA_LP (DPT+DPTb+DPK)	PPWP %	DPR RI %	DPR %	PROVINSI %	KOTA %
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j (e/c*d)	k (f/c*d)	l (g/c*d)	m (h/c*d)	n (i/c*d)
1	CIPUTAT	159.355	2.417	135.633	134.047	134.086	134.031	133.985	83,84%	82,86%	82,89%	82,85%	82,82%
2	CIPUTAT TIMUR	125.323	1.585	105.030	103.297	103.323	103.276	103.258	82,76%	81,40%	81,42%	81,38%	81,36%
3	PAMULANG	237.236	3.059	199.737	198.116	198.174	198.084	198.056	83,12%	82,45%	82,47%	82,43%	82,42%
4	PONDOK AREN	216.647	3.065	185.712	181.751	181.810	181.672	181.618	84,53%	82,72%	82,75%	82,69%	82,66%
5	SERPONG	118.602	2.055	102.491	100.312	100.370	100.248	100.200	84,94%	83,14%	83,19%	83,09%	83,05%
6	SERPONG UTARA	100.202	1.770	84.639	82.750	82.805	82.693	82.678	83,00%	81,15%	81,20%	81,09%	81,08%
7	SETU	64.872	835	56.391	55.410	55.428	55.392	55.373	85,82%	84,33%	84,36%	84,30%	84,27%
Grand Total		1.022.237	14.786	869.633	855.683	855.996	855.396	855.168	83,86%	82,51%	82,54%	82,49%	82,46%

Gambar 1. 2 Rekapitulasi partisipasi pemilih pada pilpres 2024

Sumber : Narasumber KPU Kota Tangsel

(pada tgl 3 Juli 2024, 13.15 WIB)

Pada pemilihan Presiden dan Wakil presiden pemilu di 2019 rekapitulasi sebesar 80,09 % dan untuk pemilihan Presiden dan Wakil presiden 2024 rekapitulasi sebesar 82,46 %. Total kenaikan pada pemilihan Presiden dan Wakil presiden di 2019 dan 2024 sebesar 2 %.



Gambar 1. 3 Tahapan pemilu pada pilpres 2024

Sumber : (pada tgl 27 Agustus 2024, 19.59 WIB)

<https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar/beritadetail42655456524531715979557a5241253344253>

344

Pemilu atau politik jarang dilihat dari perspektif kebudayaan. Ketua KPU RI Hasyim berharap melalui film drama komedi berjudul “Kejarlah Janji”, setidaknya film bukan sekadar tontonan, tetapi bisa menjadi tuntunan menyongsong Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Indonesia, yaitu satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Hal ini ditegaskan Ketua KPU, Hasyim Asy’ari dalam sambutan Gala Premiere di Studio XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta, Jumat 15 September 2023.

Pasal 12 huruf j Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan kepada KPU untuk menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Untuk melaksanakan amanat tersebut, KPU perlu melakukan berbagai strategi dengan metode yang efektif agar dapat mencapai target yang optimal.



Gambar 1. 4 Poster Film Kejarlah Janji

Sumber : <https://www.instagram.com/p/Cwe4x9hyaE/?igsh=MTFocjBzZDIhenk5MQ==>

(di akses pada tgl 5 Juli 2024, 15.32 WIB)

KPU perlu melakukan kampanye sosialisasi yang lebih efektif dengan kampanye yang tidak hanya berdampak pada peningkatan kesadaran (*awareness*), tetapi juga mampu menginspirasi perubahan perilaku (*behavior change*) di kalangan pemilih dan masyarakat umum. Kampanye ini harus lebih variatif dan inovatif, menggunakan pendekatan baru yang segar. Salah satu caranya adalah melalui pembuatan film cerita layar lebar. Film dapat berfungsi sebagai hiburan yang menyenangkan bagi penonton, namun juga bisa menyampaikan pesan edukatif yang kuat.

Film merupakan bagian dari media komunikasi massa yang sering digunakan untuk menggambarkan kehidupan sosial dalam masyarakat, dengan menggabungkan elemen visual dan audio. Hal ini menjadikannya sarana yang sangat menarik dalam menyampaikan pesan, cerita, dan emosi kepada penonton. Visual dalam film mencakup gambar, adegan, efek khusus, dan elemen visual lainnya, sementara audio meliputi dialog, musik, efek suara, serta komponen audio lainnya.

Melalui film ini KPU RI ingin membangun kesadaran bersama untuk menciptakan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, mengajak pemilih menggunakan hak pilihnya dengan bijak, melawan politik uang, politik identitas dan SARA, serta membangun sikap

toleransi. Film sangat kuat dalam menyampaikan pesan, hiburan, dan informasi kepada masyarakat secara luas, terutama untuk generasi milenial dan pemilih pemula gen Z.

Film ini berkisah Pertiwi (Cut Mini), ibu mandiri yang menghidupi tiga anaknya yang sedang mencari identitas diri, Sekar (Shenina Cinnamon), Adam (Bima Zeno), dan Isham (Thomas Rian). Ibu tangguh yang dipenuhi masalah sejarah suami yang kalah dalam Pilkada, tapi juga menyimpan cinta penuh misteri. Masalah menjadi penuh drama dan komedi, ketika ketiga anaknya berkumpul pulang ke rumah. Ketiganya membawa masalah terkait identitas diri dan balas dendam kekalahan ayahnya. Lucunya, anak-anak ini malah menemukan misteri cinta ibu mereka yang ingin menikah lagi. Semua terjadi di tengah riuh dan panasnya suasana menjelang Pilkada di desa yang dipimpin sosok lurah ganteng, Janji Upaya (Ibnu Jamil). Sosok lurah teladan, dengan status duda yang melahirkan beragam gosip pribadi bercampur gosip politik yang jenaka dan penuh drama.

Garin Nugroho selaku sutradara film *Kejarlah Janji* juga menambahkan, film memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini, sikap, dan perilaku penontonnya. Dengan menggambarkan situasi, karakter, atau konflik tertentu, film dapat memicu diskusi sosial, perubahan budaya, atau pengaruh politik.

Civic education menjadi sangat penting di tengah kompleksitas pemilu di era media baru yang riuh rendah. Film ini menjadi medium *civic education* yang sangat langka. Pendekatan drama komedi menjadi cara untuk mengelola warga pemilih di berbagai wilayah nusantara.

Film ini diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat luas, terutama mereka yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024. Film *Kejarlah Janji* akan tayang terbatas di bioskop-bioskop tanah air. Pemutaran keliling juga akan dilakukan di ruang-ruang publik, ruang-ruang pemutaran alternatif, jaringan bioskop, maupun layar tancap di berbagai daerah di tanah air.

Hiruk-pikuk jelang Pemilihan Umum 2024 makin terasa. Poster politisi, figur publik, anak si anu, istri si itu, hingga sanak saudara si ini menjajakan diri tapi minim visi-misi. Debat kusir si paling paham politik di dunia maya sudah bertebaran. Drama cari pasangan bak sinetron layar kaca dengan intriknya terus menambah episode baru, meski ceritanya tetap lawas.

Kendati demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu tetap berupaya untuk mengajak masyarakat datang ke tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Salah satunya melalui wahana film yang dianggap relevan dengan generasi muda yang merupakan jumlah pemilih terbesar pada pemilu kali ini, yakni 56,45 persen dari total pemilih yang mencapai 204 juta orang. Tak tanggung-tanggung, KPU menggandeng sutradara Garin Nugroho dan melahirkan film bertajuk *Kejarlah Janji* yang dirilis pada Jumat 15 September 2023 di Epicentrum, Jakarta. Nantinya film ini juga akan berada di sejumlah bioskop secara terbatas dan diputar di sekolah, pondok pesantren, hingga komunitas-komunitas di daerah.

Yang paling penting dari karya ini adalah aspek *civic education*. Belajar dari pemilu sebelumnya, media baru yang berkembang justru memecah belah hingga ke ruang keluarga kita karena menjadi pendukung pemimpin yang berbeda-beda. Saatnya melahirkan apresiasi panjang untuk merenungi.

Jika memang yang ingin disasar utama adalah generasi muda, pendekatan pop kultur melalui film memang tepat. Pengemasan secara komedi satir juga cocok dengan karakter anak-anak muda. Namun, perlu diperhatikan, generasi muda saat ini dengan gempuran digitalisasi memiliki pandangan yang mendalam terkait pemilu sebenarnya sehingga tak bisa lagi hanya bermain di permukaan.

Berikut adalah nama Sekolah dan Kampus yang di sosialisasikan film *Kejarlah Janji* di Tangerang Selatan :

Tabel 1. 1 Nama Sekolah Dan Kampus di Tangsel

No.	Nama Sekolah
1.	Pondok pesantren jagat arsy
2.	STMKG
3.	MAN Insan Cendikia Serpong
4.	UIN
5.	UMJ

Sekolah atau perguruan tinggi yang dipilih untuk sosialisasi film "*Kejarlah Janji*" oleh KPU, termasuk di Kota Tangerang Selatan, dipilih berdasarkan beberapa alasan strategis, terutama

karena dari KPU RI memilih perguruan tinggi, dan 3 perguruan tinggi di tunjuk di kota untuk menayangkan film “ *Kejarlah Janji* “ Berikut beberapa alasan yang mendasari pemilihan hanya 5 perguruan tinggi:

1. Efisiensi Anggaran: Keterbatasan biaya merupakan faktor utama yang memaksa KPU untuk membatasi jumlah perguruan tinggi yang dilibatkan. Dengan memilih hanya 5 perguruan tinggi, KPU dapat memfokuskan sumber daya mereka secara lebih efektif, sehingga pelaksanaan kegiatan sosialisasi lebih maksimal.
2. Cakupan Representatif: Pemilihan 5 perguruan tinggi didasarkan pada keinginan untuk mendapatkan representasi yang luas namun efisien dari berbagai kalangan mahasiswa di Tangerang Selatan. Perguruan tinggi tersebut kemungkinan memiliki jumlah mahasiswa yang signifikan atau dianggap berpengaruh, sehingga sosialisasi lebih berdampak.
3. Fokus pada Lembaga Pendidikan Besar: KPU memilih perguruan tinggi yang lebih besar atau terkenal karena daya jangkau dan pengaruh mereka lebih luas. Perguruan tinggi ini biasanya memiliki jaringan yang lebih baik untuk menyebarkan pesan sosialisasi ke masyarakat umum, termasuk melalui mahasiswanya.
4. Pertimbangan Logistik dan Waktu: Dengan hanya memilih 5 perguruan tinggi, KPU dapat mengelola waktu dan sumber daya logistik dengan lebih baik, seperti peralatan pemutaran film, staf, dan materi sosialisasi. Jumlah perguruan tinggi yang terbatas membuat pengelolaan acara menjadi lebih efisien.

Pemilihan ini menunjukkan bahwa KPU berusaha memaksimalkan hasil kampanye dengan anggaran yang terbatas, sambil tetap mencapai dampak yang luas melalui perguruan tinggi yang dipilih.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka teridentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana KPU RI memberikan sosialisasi dalam penyelenggaraan pemilu?
- b. Bagaimana KPU RI memberikan Pendidikan politik mengenai pemilu untuk pemilih pemula sebagai langkah mencegah golput?

- c. Bagaimana kampanye humas KPU RI pada pemilu melalui film kejarlah janji?

1.3 Pembatasan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah diatas, Maka penelitian ini di batasi pada “Kampanye Humas Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Ri Melalui Film Kejarlah Janji Di Kota Tangerang Selatan”

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bagaimana Kampanye Humas Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Ri Melalui Film Kejarlah Janji pada pemilih pemula di Kota Tangerang Selatan

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini untuk menggali informasi mengenai hal-hal sebagai berikut:

Kampanye Humas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) Melalui Film Kejarlah Janji Di Kota Tangerang Selatan yang meliputi sebagai berikut :

Kampanye humas :

- a. Aspek Kesadaran (*Awareness*) pemilih pemula melalui Film Kejarlah Janji
- b. Aspek Sikap (*Attitude*) pemilih pemula dengan menerima dan memahami pentingnya keikutsertaan pemilu
- c. Aspek Perilaku (*Behaviorial*) menumbuhkan kesadaran pemilih pemula akan pentingnya akan partisipasi pada pemilu

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademis, penelitian ini menjadi syarat agar memperoleh gelar sarjana bagi mahasiswa dan dapat sebagai referensi untuk memberikan kontribusi dalam strategi humas.
- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi KPU RI tentang Kampanye Humas, dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum.